

BAB V

PENUTUPAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pola koalisi parpol dalam pembahasan peraturan daerah tentang APBD. Lombok Timur untuk tahun anggaran 2021 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. teori koalisi berbasis kebijakan

DPRD Lombok Timur menciptakan sistem pemerintahan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Tidak ada pola koalisi yang berlebihan untuk menunjukkan kekuatannya masing-masing, namun yang dilakukan oleh partai politik, dalam pembahasan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 yaitu dengan cara pola koalisi kolaboratif (kerjasama) dalam mencapai tujuan yang dibuktikan dengan teks pandangan fraksi. fraksi-fraksi yang ada, dimana anggota DPRD saling mendukung untuk menjadikan Lombok Timur lebih baik sesuai dengan visi dan misi Pemkab. Lombok Timur adalah “Lombok timur yang adil, makmur, dan aman”.

a. Loyalitas peserta koalisi minimal diikat oleh kesamaan tujuan kebijakan

Kolaborasi Lombok Timur antar partai (anggota) diikat dengan tujuan yang sama yaitu membentuk pemerintahan yang kuat di legislatif, membahas peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 di kabupaten. Lombok Timur tidak memiliki koalisi parpol yang secara khusus menunjukkan kekuatan yang ada. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yang terlihat dari

cara mereka menyatukan aspirasi yang dibawa oleh masing-masing, melalui musyawarah.

b. “ kebijakan mencari ” (mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan partai)

Di Lombok Timur, semua anggota membawa kepentingannya secara pribadi dari daerah pemilihannya masing-masing, tetapi ketika dalam diskusi internal, fraksi mereka bergabung untuk membentuk dan menyepakati prioritas pekerjaan mereka yang akan dibawa ke tahap diskusi berikutnya.

5.2. Saran

Dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan di Lombok Timur, DPRD harus menjaga stabilitas politik terutama dalam pengawasan, kebijakan yang dibentuk oleh badan eksekutif dan sebagainya agar apa yang kita harapkan bersama bisa kita bagi bersama, seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, yang efektif dan efisien sehingga akan terbentuk tata kelola yang profesional di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Isnaini Ibrahim, (2020). *Koalisi Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia*. Yogyakarta : CV Markumi.
- Miriam Budiarto, (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik* . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal :

- Mahesa Rannie, Zulhidayat, (2017). *Pola Koalisi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Majalah Ilmiah, NO. 3, VOLUME XXIV, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Dery Setyadi, (2017). *Strategi Koalisi Partai Melawan Pemenangan Pasangan Haris-Zardewan di Pilkada Pelalawan 2015* . Jurnal Mahasiswa Online (JOM), No. 2, Vol. 4, FISIP Universitas Riau.
- Yusrijal Abdar, (2018). *Koalisi Parpol dalam UU No. 10 Tahun 2016*. Jurnal Magnum Opus Law No.1, Vol. I , Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Ayatullah Hadi, Muhammad Ali, Ilham Zitri, (2022). *Pola Koalisi Partai Politik dalam Pembahasan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Mandala (JIME), No. 1, Vol. 8, p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Tesis / Tesis:

- HIDAYAT JAYA MIHARJA, (2020). *Pola Koalisi Partai Politik dalam Penetapan Perangkat Dewan (Studi: Dprd Kota Mataram)*. Skripsi Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- SERLI MARSELINA, (2020). *Koalisi Partai Politik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia (Studi Pilkada Langsung di Provinsi Jambi Tahun 2015)*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hukum/Peraturan Pemerintah:

- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,
- Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Situs web:

- Penetapan perubahan peraturan daerah nomor 7 tahun 2020 tentang APBD menjadi Peraturan Daerah. Diakses melalui <https://dprd.lomboktimurkab.go.id> (21/06/2022).
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur. Diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org> (27/06/2022).

Sejarah DPRD Kabupaten Lombok Timur diakses melalui <https://dprd.lomboktimurkab.go.id> (30/07/2022)

Letak geografis lombok timur. Diakses melalui <https://www.sasambo.id> (31/07/2022)

Daftar anggota dprd kab. lombok timur. Diakses <https://bakesbangpoldagri.lomboktimurkab.go.id> (31/07/2022)







Gambar : wawancara dengan wakil dprd kab. Lombok timur



Gambar : wawancara dengan bidang humas dan kesekretariatan dprd kab. Lombok timur



Gambar : wawancara dengan ketua dprd kab. Lombok timur



Gambar : wawancara dengan ketua fraksi pdi- p dprd kab. Lombok timur